

# Etno-Nasionalisme dan Demokrasi dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia

I Made Gianyar<sup>1\*</sup>, I Wayan Gede Suacana<sup>1</sup> 

<sup>1</sup>Universitas Warmadewa, Indonesia

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received July 25, 2024

Revised August 21, 2024

Accepted August 30, 2024

Available online August 31, 2024

### Kata Kunci:

Demokrasi; Diferensiasi Sosial; Ethno-Nasionalisme; Nasionalisme; Multikultural

### Keywords:

Democracy; Social Differentiation; Ethno-Nationalism; Nationalism; Multicultural



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

kesetaraan akses publik dan integrasi sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam memahami dinamika nasionalisme, etno-nasionalisme, dan glocalisasi di Indonesia serta menawarkan perspektif baru dalam menghadapi tantangan yang dihadapi NKRI di era globalisasi.

## ABSTRACT

*This study examines the interplay between glocalization and ethno-nationalism within the context of the Republic of Indonesia (NKRI) and its impact on national integrity and the motto Bhineka Tunggal Ika. Glocalization, which blends global and local elements, not only influences cultural identity but also triggers a resurgence of nationalism and ethno-nationalism, particularly in a pluralistic nation. The research also investigates the role and effectiveness of state and social institutions in mediating ethnic conflicts during the reform era, when the weakening of state authority has led to escalating ethnic and political conflicts. Furthermore, the study explores the phenomenon of "homelessness" in the internal context of Indonesia as a consequence of glocalization and decentralization. Using social differentiation and social integration theories, the research finds that increased heterogeneity and social inequality can hinder social integration and exacerbate ethnic conflict. Multiculturalism as a political policy and social practice in Indonesia still faces significant challenges in achieving equitable public access and social integration. This study offers new insights into the dynamics of nationalism, ethno-nationalism, and glocalization in Indonesia and provides a fresh perspective on addressing the challenges faced by the NKRI in the era of globalization.*

## 1. PENDAHULUAN

Kalangan pendukung teori postmodern menyatakan bahwa "global paradoks" dengan kontak budaya semacam itu tidak mungkin lagi dihindarkan, dan semua itu akan membawa pengaruh timbal balik dengan cara yang mendalam, sehingga terjadi fenomena apa yang oleh para ahli postmodern disebut sebagai glocalisasi (globalisasi dan lokalisasi) budaya, dengan mana unsur global dan lokal saling bertukar dan dapat hidup bercampur menjadi satu (Triguna, 2002). Jika diamati secara cermat, diskursus glocalisasi tak serta merta menghilangkan ideologi nasionalisme. Bahkan nasionalisme secara paradoks justru menunjukkan gejala menguat ketika negara-negara di muka bumi ini saling berkompetisi satu sama lain

\*Corresponding author

E-mail addresses: [mariasih@undiksha.ac.id](mailto:mariasih@undiksha.ac.id)

dalam kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, dan budaya global (Gaffar, 1988; Kartodirdjo, 1972; Nasikun, 1988; I. W. G. Suacana, 2005).

Pada saat yang bersamaan, di sisi lain, dari dalam negara bangsa dan nasionalisme, bangkit kesadaran politik etnik (etno-nasionalisme) yang mengandung keunikan, originalitas, kecil sebagai fondasi baru bagi pengaturan politik yang adil dan absah. Kesadaran politik etnik tidak jarang diawali oleh terjadinya konflik etnis. Munculnya berbagai konflik etnis tersebut biasanya berbasis pada primordialisme. Konflik jenis ini menempatkan akar persoalan lebih banyak pada perbedaan etnis, ideologi politik dan dogmatisme agama. Berbagai lembaga kenegaraan dan pranata sosial yang ada seakan mengalami keruntuhan wibawa, legitimasi dan tidak berfungsi secara normal sehingga tidak dapat memediasi konflik yang terjadi (Taylor, 1994).

Sementara itu, seiring dengan tiupan angin reformasi, runtuhnya rezim Soeharto dan diberlakukannya perluasan otonomi daerah telah menimbulkan keinginan di beberapa daerah untuk memisahkan diri minimal menuntut diberlakukannya sistem federal seperti yang pernah berkumandang di Kalimantan Timur dan Riau, atau otonomi khusus seperti yang sudah mulai disuarakan kembali di Bali akhir-akhir ini (Hobsbwan, 1992; Huntington, 2000; Kartodirdjo, 2000; Triguna, 2002).

Fenomena tersebut sekaligus menyiratkan sebagian komponen negeri ini mulai terusik dan merasa tidak *at home* lagi sebagai bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan semboyan Bhineka Tunggal Ika, kesatuan dalam perbedaan. Mereka merasa asing dan diasingkan di atau dari tempat kelahirannya sendiri yang dalam terminologi Bergerian disebut sebagai gejala 'ketidakberumahan' (Kohn, 1984; Krishna, 2005; Kusumohamidjojo, 2000; Mardiansyah, n.d.).

Pengertian nasionalisme menurut Ernest Gellner adalah suatu prinsip politik yang beranggapan bahwa unit nasional dan politik seharusnya seimbang. Tepatnya, Gellner lebih menekankan nasionalisme dalam aspek politik. Lebih lanjut menurut Gellner, jika nasionalisme adalah suatu bentuk munculnya sentimen dan gerakan, baru kita dapat mengerti dengan baik jika kita mendefinisikan apa itu gerakan dan sentimen (Amal, Ichlasul, & Armawi, 2000; Bennet, 1993; Budiardjo, 1986; Russel, 1988). Apa yang dimaksudkan sebagai suatu sentimen adalah secara psikologis merupakan suatu bentuk antipati atau ungkapan marah, benci, dan lain sebagainya<sup>1</sup>. Dari penawaran Gellner tersebut mengenai konsep sentimen dan gerakan, nampaknya telah menjadi penekanannya dalam melihat nasionalisme (Suparlan, 2014).

Lebih dari satu dekade yang lalu, Benedict Anderson menekankan nasionalisme tidak dalam aspek politik sebagaimana halnya Gellner, tapi justru tertarik untuk memahami kekuatan dan kontinuitas dari sentimen dan identitas nasional. Ia melontarkan gagasannya tentang komunitas imajiner masyarakat khayalan (*imagined communities*). Konsep ini menarik karena Anderson, dengan menggunakan pendekatan Durkheimian, mengklaim bahwa nasionalisme berakar dari sistem budaya dalam suatu kelompok masyarakat yang saling tidak mengenal satu sama lain. Kebersamaan mereka dalam gagasan mengenai suatu bangsa dikonstruksi melalui khayalan yang menjadi materi dasar nasionalisme (Schefold, 1998).

Meskipun berbeda perspektif, akan tetapi keduanya menekankan bahwa bangsa (nasion) adalah suatu konstruksi ideologi yang nampak sebagai pembentuk garis antara (defenisi-diri) kelompok budaya dan state (negara), dan mereka membentuk komunitas abstrak berdasarkan perbedaan dari negara dinasti atau komunitas berdasarkan kekerabatan yang mendahului pembentukan mereka. Sebaliknya, menurut H. Kohn, nasionalisme adalah suatu "*state of mind and an act of consciousness*", jadi sejarah pergerakan nasional harus dianggap sebagai suatu "*history of idea*". Dari pernyataan ini secara sosiologis, ide, pikiran, motif, kesadaran harus selalu dihubungkan dengan lingkungan yang konkrit dari situasi sosio-historis. Pengertian lain dari nasionalisme dapat disebut sebagai "*social soul*" (K. Lamprecht, 1920), "mental masyarakat" (F. Meinecke, 1901), "sejumlah perasaan dan ide-ide yang kabur" (F. Hertz, 1951), dan sebagai "*a sense of belonging*". Dan beberapa lagi pengertian nasionalisme yang lain, yaitu merupakan produk atau antitesis dari kolonialisme (Setyaningrum, 2003).

Dari berbagai pengertian di atas tidak terdapat perbedaan yang mendasar, justru menunjukkan persamaan, yaitu semuanya lebih bersifat sosio-psikologis. Ini berarti nasionalisme sebagai suatu bentuk respons yang bersifat sosio-psikologis tidak lahir dengan sendirinya, akan tetapi lahir dari suatu respons secara psikologis, politis, dan ideologis terhadap peristiwa yang mendahuluinya, yaitu imperialisme (kolonialisme). Jika demikian halnya, maka awal terbentuknya nasionalisme lebih bersifat subjektif, karena

lebih merupakan reaksi “*group consciousness*”, “*we-sentiment*”, “*corporate will*”, dan berbagai fakta mental lainnya (Nash, J, 1975; Nasikun, 1988; Parimartha, 2002).

Dari sekian jumlah penggunaan istilah di atas umumnya tidak jelas, sebab semuanya merupakan komponen-komponen keadaan jiwa dan pikiran yang tidak dijelaskan secara rinci perbedaannya. Dengan demikian, akan mengalami kesulitan dalam menggunakannya sebagai terminologi maupun konsep analitis untuk mencari struktur dan sifat-sifat nasionalisme itu sendiri (Alomnd, 1977; Amal, Ichlasul, & Arnawi, 2000; Ansyar, 2003; Arifin, 2004). Secara analitis, nasionalisme mempunyai tiga aspek yang dapat dibedakan, pertama aspek *cognitive*, yaitu menunjukkan adanya pengetahuan atau pengertian akan suatu situasi atau fenomena, dalam hal ini adalah pengetahuan akan situasi kolonial pada segala porsinya; aspek *goal/ value orientation*, yaitu menunjukkan keadaan yang dianggap berharga oleh pelakunya; dalam hal ini yang dianggap sebagai tujuan atau hal yang berharga adalah, memperoleh hidup yang bebas dari kolonialisme; aspek *affective* dari tindakan kelompok menunjukkan situasi dengan pengaruhnya yang menyenangkan atau menyusahkan bagi pelakunya. Misalnya berbagai macam diskriminasi pada masyarakat kolonial melahirkan aspek *affective* tersebut. Pengertian nasionalisme dengan demikian tidaklah kaku dan sempit, artinya hanya ada bila suatu negara mengalami kolonisasi fisik dari negara asing (Bahar, 2000). Nasionalisme selalu hadir sepanjang sejarah kebangsaan dengan corak dan dimensi berbeda. Ia bukanlah sebuah produk akhir, tetapi sebuah proses. Secara sosiologis, nasionalisme adalah *situationsgebunden*, terikat dalam situasi, berkembang dengan berkembangnya keadaan, sehingga nasionalisme akan muncul dalam perwujudan yang berbeda dan mungkin dalam nama yang berbeda. Lalu, bagaimana hubungan antara nasionalisme dengan etno-nasionalisme ?

Nasionalisme selalu menyertai konsep pembangunan bangsa (*national-building*). Sasaran nasionalisme itu sendiri adalah lebih sekedar perluasan dan penyebaran kesadaran berbangsa atau terbentuknya suatu negara bangsa. Pembangunan bangsa adalah upaya terencana dan berkelanjutan untuk menanamkan kesadaran pada kalangan yang luas dalam masyarakat, bahwa walaupun beraneka ragam latar belakang etnik, ras dan agama ataupun budaya, namun mereka adalah satu bangsa. Jadi antara nasionalisme, *nation-building* dan *nation-state*, merupakan wujud dari nasionalisme *in action* (Russell, 1988). Searah dengan itu, Mohtar Mas’oed berusaha membahas nasionalisme dalam dua sisi, yaitu sisi gagasan atau ideasional dan sisi kebijakan atau struktural. Pada sisi gagasan atau ideasional, nasionalisme dianalisis sebagai *state of mind* atau sebagai perwujudan kesadaran nasional dari para individu sebagai suatu anggota bangsa. Sedangkan dari sisi struktural/ kebijakan, nasionalisme dipahami sebagai suatu strategi politik, atau fenomena politik (Nash, J, 1975). Pada sisi ini, dikaitkan dengan kekuasaan, dimana nasionalisme didefinisikan sebagai gerakan politik yang berusaha memperoleh dan menerapkan kekuasaan negara dan memberi pembenaran terhadap tindakan tersebut dengan argumen-argumen nasionalis. Apa yang dimaksudkan oleh Safoedin Bahar dan Mas’oed (sisi ideasional/ gagasan) terkait dengan upaya Anderson untuk menjelaskan konsep nasionalisme dengan menghubungkan dengan konsep nasion atau bangsa. Bangsa bagi Anderson adalah sesuatu yang imajiner karena para anggota bangsa terkecil pun tidak bakal tahu dan kenal sebagian besar anggota lain, tidak bertatap muka dengan sebagian besar anggota lain itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka, namun di benak setiap orang, menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka. Salah satu sebab mengapa ikatan kebangsaan demikian kuat adalah adanya akar kultural yang mendekati religius, yang menopang komunitas tersebut. Kebangsaan menawarkan kontinuitas di hadapan diskontinuitas. Bangsa-bangsa selalu membayangkan secara samar-samar suatu masa lalu yang tak terlupakan dan bahkan meluncurkan masa depan yang tak terbatas (Jack C. Plano et al., 1989).

Singkatnya, “nasionalisme” merupakan produk dari perkembangan historis, baik konsep maupun perwujudannya. Proses perkembangannya lazimnya dikaji dengan melacak pertumbuhan nasionalisme sebagai suatu ideologi dalam sejarah bangsa itu sendiri. Dengan demikian nasionalisme sebagai fenomena historis, timbul sebagai jawaban terhadap kondisi-kondisi historis, politik ekonomi dan sosial tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan adalah munculnya kolonialisme dari suatu negara terhadap negara lainnya. Hal ini terjadi sebab nasionalisme itu sendiri muncul sebagai suatu reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus menerus. Dan hal ini tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga dalam bidang ekonomi sosial dan

kulturil. Sementara itu, etno-nasionalisme merupakan paham kebangsaan dengan sentimen etnis (agama, suku, dan ras) sebagai basisnya. Apa yang tadinya bernama etnisitas atau pun semangat etnosentrisme ingin diwujudkan ke dalam suatu entitas politik yang bernama negara bangsa. Etno-nasionalisme seringkali diberikan pula kepada "gerakan nasionalis". Dari sudut pandang etnis di suatu negara, konsensus gerakan etno-nasionalisme ini secara fundamental terletak pada masalah politik dan emosional daripada ekonomi serta dipandang pula gerakan yang melibatkan massa (Naisbitt, 1994).

Dalam konteks kebangsaan yang lebih besar (negara bangsa), gejala etno-nasionalisme ini dapat pula dipandang sebagai pendefinisian rasa kebangsaan kepada ikatan-ikatan yang lebih primordialistik (etnik). Atau dapat juga dipandang sebagai hilangnya loyalitas suatu kelompok etnis kepada suatu kesepakatan terhadap ikatan yang lebih besar (negara bangsa). Karenanya, secara psikologis, gejala disintegrasi bangsa dengan basis pengertian etno-nasionalisme dapat pula dipandang sebagai fenomena "keluar-masuk" kelompok (*group formation-dissolution*). Dalam bukunya, *Theory of Nationalism*, Anthony D Smith mengemukakan gagasan yang menjadi landasan filosofis etno-nasionalisme, sebagai berikut: "...bagi mereka, kekuasaan dan nilai melekat secara otomatis dalam kelompok budayanya. Keduanya adalah dimensi yang tidak dapat dipisahkan (Alomnd, 1977; Benedict, 1991). Kelompoknya adalah sumber kebijaksanaan, keindahan, kesucian, kebudayaan, sehingga kekuasaan menjadi milik kelompok. Betapapun terjadi distribusi kekuasaan dalam kurun waktu tertentu, kekuatannya yang nyata tetap berasal dari langit, bukan karena keajaiban bumi, dan dimiliki oleh mereka yang memiliki hubungan khusus dengan para dewa...". Gagasan awalnya bersifat tradisional, lalu dikembangkan ke dalam bentuk-bentuk relasi kekuasaan yang eksklusif (Mas'ood, 1998).

Dengan demikian, substansi masalah yang terkandung dalam upaya menangkal serta menanggulangi masalah etno-nasionalisme ini adalah bagaimana mengatur tatanan kenegaraan bangsa di atas komunitas tradisional yang sudah ada sehingga tidak ada keinginan untuk keluar dari kelompok yang lebih luas (negara bangsa). Di samping itu, penelusuran akar psikologis terhadap fenomena etno-nasionalisme ini mutlak dilakukan. Jika ditelusuri, hasrat untuk hidup secara lebih bermartabat merupakan hakekat kekuatan pergerakan untuk memperoleh kemerdekaan dalam menentang berbagai bentuk pemerintahan yang represif, yang seringkali tercantum dalam pernyataan kemerdekaan suatu bangsa. Semangat seperti itulah yang kemudian menjadi tolok ukur dari kinerja negara bangsa yang sejatinya sangat sulit karena sering harus berhadapan dengan kondisi masyarakatnya yang terdiferensiasi secara sangat tajam (Mohanty & Dash, 2018; I. W. Suacana, 2024).

*State of the art* penelitian tentang globalisasi dan dampaknya terhadap identitas lokal serta nasionalisme telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur akademis. Teori postmodern, terutama konsep glocalisasi, telah menjelaskan bagaimana proses globalisasi dan lokalisasi terjadi secara simultan, menciptakan interaksi antara elemen global dan lokal. Glocalisasi, sebagai sebuah fenomena, menunjukkan bahwa budaya global tidak hanya mengubah budaya lokal tetapi juga sebaliknya, di mana budaya lokal mengadaptasi dan menyesuaikan unsur-unsur global sesuai dengan konteks lokalnya. Studi sebelumnya banyak berfokus pada dampak glocalisasi terhadap identitas budaya, ekonomi, dan politik di berbagai negara. Misalnya, beberapa penelitian telah menunjukkan bagaimana globalisasi dapat memicu kebangkitan nasionalisme, terutama ketika negara-negara bersaing di panggung global. Di sisi lain, penelitian tentang etno-nasionalisme dan kesadaran politik etnik mengungkapkan bahwa globalisasi juga dapat memicu konflik etnis, terutama di negara-negara dengan latar belakang pluralistik.

Adapun gap pada penelitian ini adalah, meskipun banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai glocalisasi dan etno-nasionalisme, ada beberapa celah penting yang belum sepenuhnya dijelaskan, yaitu: interaksi antara glocalisasi dan etno-nasionalisme dalam konteks negara kesatuan republik Indonesia (NKRI). Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kasus negara-negara dengan sistem federal atau yang telah mengalami disintegrasi. Namun, kajian yang secara spesifik mengamati bagaimana fenomena glocalisasi mempengaruhi dinamika etno-nasionalisme dalam konteks NKRI, dengan fokus pada tantangan terhadap semboyan Bhineka Tunggal Ika, masih relatif terbatas. Krisis legitimasi pranata sosial dan kenegaraan di era reformasi. Penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada dampak politik dan ekonomi dari reformasi, tetapi analisis mendalam mengenai bagaimana runtuhnya wibawa lembaga kenegaraan dan sosial mempengaruhi eskalasi konflik etnis dan politik etnik di Indonesia, terutama setelah

era Soeharto, belum banyak dilakukan. persepsi ketidakberumahan dalam konteks glokalisasi. Teori "ketidakberumahan" dari perspektif Bergerian sering kali digunakan untuk menjelaskan pengalaman diaspora atau migrasi, namun jarang diaplikasikan dalam analisis dinamika internal sebuah negara yang sedang mengalami perubahan akibat glokalisasi dan desentralisasi.

Berdasarkan analisis di atas, penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji interaksi antara proses glokalisasi dan etno-nasionalisme dalam konteks NKRI, serta implikasinya terhadap integritas nasional dan semboyan Bhineka Tunggal Ika; (2) Menganalisis peran dan efektivitas pranata kenegaraan dan sosial dalam mediasi konflik etnis dan politik etnik di Indonesia pada era reformasi; (3) Mengeksplorasi fenomena "ketidakberumahan" dalam konteks internal Indonesia, khususnya terkait dengan dampak glokalisasi dan otonomi daerah terhadap identitas dan kesadaran nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman tentang dinamika nasionalisme, etno-nasionalisme, dan glokalisasi di Indonesia, serta menawarkan perspektif baru dalam melihat tantangan yang dihadapi NKRI di era globalisasi.

## 2. METODE

Penelitian lebih menitikberatkan pada jenis pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana pertimbangan sifat dan ruang lingkup masalah penelitian yang bersifat multidisiplin, berbau serta bersilangan satu dengan yang lain, maka penyajian hasil analisisnya dibuat dalam bentuk deskripsi analitis. Pilihan terhadap jenis penelitian kualitatif juga didasarkan pada pertimbangan fenomena yang akan diteliti, yaitu menyangkut relasi antar data dan fakta kearifan lokal, budaya birokrasi serta pelayanan publik yang bersifat plural dari aspek ide/ pemikiran-pemikiran yang berkembang dalam komunitas sosial tertentu (Flick, 2006: 12-13).

Jenis data penelitian sebagian besar termasuk data kualitatif, sedang yang lainnya berupa data kuantitatif. Data kualitatif berupa ungkapan serta penjelasan dari beberapa tokoh kunci masyarakat yang berwujud uraian, narasi, dan butir-butir pemikiran. Instrumen penelitian pedoman wawancara mendalam (*depth interview guide*) yang tidak terstruktur berupa pertanyaan terbuka yang memungkinkan setiap pertanyaan berkembang ke arah yang lebih spesifik. Disamping itu juga dilengkapi dengan alat perekam dan kamera digital, serta catatan lapangan (*field notes*) dan kartu ikhtisar yang mencatat apa yang dilihat, didengar, dialami dan dipikirkan pada saat proses pengumpulan data (Blau, 1975; Cassel & Symon, 1994).

Informan dalam penelitian ini adalah pejabat terkait serta akademisi yang dianggap memahami permasalahan. Penentuan informan pertama-tama dilakukan dengan mencari sejumlah calon informan secara *purposif* yakni dengan mengambil orang-orang yang terpilih secara cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Pemilihan informan ini didasarkan pada sistem bola salju (*snowball system*) yaitu dari satu responden yang telah diseleksi lalu melakukan sistem kerja "*follow your nose*", yaitu menajamkan penciuman terhadap siapa lagi yang dapat memberikan informasi untuk melengkapi hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan interaktif dan non interaktif. Pengumpulan data dengan interaktif dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan wawancara mendalam. Sedangkan cara non interaktif dilakukan dengan pemanfaatan dokumen. Tahapan kegiatan penelitian dilakukan seperti terlihat pada Tabel 1.

**Tabel 1. Tahapan Kegiatan Penelitian**

<b>Survei Pendahuluan</b>	<b>Deskripsi pelaksanaan layanan publik di Kota Denpasar</b>
Penyusunan daftar kebutuhan data	Daftar data yang dibutuhkan dalam penelitian
Pengumpulan data lapangan	Data penelitian
Wawancara	Informasi model pelaksanaan layanan publik di Kota Denpasar
Tabulasi data	Data tertabulasi
Editing data	Data siap dianalisis
Analisis data	Hasil Analisis
Pembahasan temuan penelitian.	Penyempurnaan hasil analisis, dan pelaporan
Pelaporan hasil penelitian, seminar dan publikasi ilmiah	Penyempurnaan hasil kajian Seminar dan publikasi jurnal

Analisis data yang terdiri tiga kegiatan utama, yakni penyajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi merupakan rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya. Penyajian data dilakukan berdasarkan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal, dan kelemahan atau gap dalam data. Setelah data disajikan selanjutnya dideskripsikan dengan membangun kategori yang menempatkan perilaku atas proses yang terjadi dengan mengorganisir data seputar topik, atau pertanyaan pokok (Cassel & Symon, 1994)

Penyajian hasil analisis data dilakukan dengan menggabungkan cara informal (deskriptif-naratif) dengan cara formal (membuat berbagai macam bagan, tabel, gambar). Cara penyajian informal (deskriptif-naratif) atau dengan uraian kata-kata dilakukan dengan memaparkan keadaan subjek yang diselidiki sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat penelitian dilakukan. Penyajian data dibuat secara sistematis dan efisien sehingga mudah dipahami dan dapat memberikan kejelasan yang optimal.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Diferensiasi Sosial Masyarakat

Struktur sosial masyarakat biasanya ditentukan oleh parameter yang membentuknya, yakni kriteria implisit yang membedakan para anggota masyarakat didalam hubungannya satu sama lain. Dengan perkataan lain, parameter struktur sosial adalah atribut yang dimiliki oleh para anggota masyarakat, yang membedakan posisi sosial dan dengan demikian mempengaruhi hubungan peran mereka satu sama lain. Ada dua jenis parameter struktur sosial menurut Peter M. Blau. Pertama, parameter nominal, yakni pembagian warga masyarakat kedalam kelompok-kelompok dengan batas-batas yang bersifat diskrit tanpa memiliki konotasi perbedaan kelas (suku bangsa, agama, ras dan sejenisnya). Kedua, parameter kelas, yakni pendistribusian para anggota masyarakat kedalam tertib status berjenjang (pendapatan, kekayaan, kekuasaan dan semacamnya) yang secara teoritik tidak membedakan status yang satu dari yang lain secara diskrit melainkan secara kontinu.

Dua bentuk diferensiasi sosial dapat dibedakan sebagai konsekuensi bekerjanya kedua jenis parameter tersebut, yaitu: 1) heterogenitas (heterogeneity) yang merupakan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang pertama; dan 2) kesenjangan sosial (inequality), yang merupakan diferensiasi berdasarkan parameter kedua. Kedua bentuk diferensiasi itu, baik oleh kekuatan masing-masing maupun oleh dampak hubungan mereka satu sama lain, pada gilirannya memiliki konsekuensi sangat penting terhadap proses integrasi suatu masyarakat, dan pada tingkat lain terhadap pertumbuhan suatu sistem demokrasi. Tesis yang sering dikemukakan bahwa semakin tinggi tingkat heterogenitas atau kesenjangan sosial masyarakat semakin menghambat terjadinya hubungan sosial dan proses integrasi sosial (Hobsbwan, 1992; Huntington, 2000; Kartodirdjo, 1972; Krishna, 2005; Mardiansyah, n.d.; Nash. J, 1975; Russell, 1988).

Hubungan antara berbagai parameter struktur sosial dapat mengambil bentuk "interseksi", atau sebaliknya "konsolidasi". Yang pertama terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter jatuh bersilangan (crosscutted) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain, sedemikian rupa sehingga "perbedaan" keanggotaan banyak orang didalam berbagai kelompok atau status berdasarkan suatu parameter menempatkan mereka didalam "kesamaan" keanggotaan mereka didalam kelompok atau status berdasarkan parameter yang lain. Dengan perkataan lain, interseksi terjadi apabila berbagai parameter struktur sosial secara sistematis tidak saling berkorelasi satu sama lain (Setyaningrum, 2003; I. W. G. Suacana, 2005; Suparlan, 2014).

Konsolidasi parameter struktur sosial, sebaliknya, terjadi apabila diferensiasi sosial berdasarkan suatu parameter tertentu jatuh berhimpitan atau bertumpang tindih (consolidated) dengan diferensiasi sosial berdasarkan parameter yang lain, sedemikian rupa sehingga perbedaan keanggotaan banyak orang didalam berbagai kelompok atau status tertentu secara sistematis "diperkuat" oleh perbedaan keanggotaan kelompok atau status berdasarkan parameter lain.

Di dalam tesis Gabriel A. Almond, sebagaimana dipergunakan didalam skema taksonominya, yang pertama menciptakan struktur sosial dengan diferensiasi yang tinggi dan dengan kebudayaan yang bersifat "sekuler" serta 'homogeneous', sementara situasi yang kedua membentuk struktur masyarakat dengan diferensiasi yang rendah dan kebudayaan yang bersifat "multikultural". Dengan mengikuti teori integrasi

sosial Furnivall sejumlah properti hubungan-hubungan sosial yang biasa kita temukan sebagai konsekuensi dari struktur masyarakat yang multikultural adalah: 1) kecenderungan berkembangnya perilaku konflik di dalam hubungan-hubungan antar berbagai komunitas atau kelompok; 2) berkembangnya kecenderungan para pelaku konflik melihat konflik bukan sebagai suatu game melainkan sebagai suatu total war; dan 3) berkembangnya proses integrasi sosial berdasarkan dominasi oleh suatu komunitas atau kelompok di atas komunitas atau kelompok lain (Huntington, 2000; Kartodirdjo, 2000; Taylor, 1994).

Dikatakan oleh Afan Gaffar, bahwa dalam sistem sosial yang tingkat pemilalahannya tidak lagi bersifat membaaur (crosscutting) akan tetapi bahkan bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk dipelihara, sebab biasanya konflik yang ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat (centripetal) akan tetapi bersifat memencar (centrifugal). Dalam situasi konflik yang sifatnya memencar, maka konflik akan menjadi sangat sulit diselesaikan. Terjadinya konflik etnis di negara-negara berkembang, menurut Horowitz berkaitan erat dengan berlangsungnya modernisasi. Konflik antar-etnis menurutnya terjadi karena adanya ketidakseimbangan keuntungan yang diperoleh berbagai etnis dengan dilakukannya modernisasi. Ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan dalam sektor modern adalah sebab utama mengapa konflik antar-etnis seringkali terjadi. Lalu, dimana fungsi multikulturalisme dan nasionalisme?

### **Bingkai Multikulturalisme dan Nasionalisme**

Multikulturalisme dalam pengertiannya yang paling ideal menyiratkan kehendak untuk membawa semua ekspresi kebudayaan ke dalam struktur yang seimbang dimana praktek penghormatan terhadap keberbedaan ditujukan untuk mengatasi masalah 'eksklusivitas' yang dapat memicu konflik etnis, rasial maupun religius. Apa yang seringkali menjadi basis epistemologis konsep multikulturalisme ini pada prakteknya memiliki dua bentuk yang berbeda. Kedua bentuk praktek multikulturalisme tersebut didapati dalam wujud suatu kebijakan politik dan sekaligus merupakan praktek sosial dari realitas kebudayaan sehari-hari sebuah masyarakat yang majemuk (Kohn, 1984; Kusumohamidjojo, 2000; Suparlan, 2014).

Multikulturalisme yang seringkali diidealkan dalam kebijakan politik seringkali justru berlawanan dalam dengan realitas sosial yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kini, memperbincangkan multikulturalisme sebagai realitas sosial masih menjadi perdebatan yang menarik. Ini tidak lain berkenaan dengan bagaimana suatu proses menyalurkan aspirasi masyarakat yang majemuk berkenaan bukan hanya dengan konstruksi identitas nasional melainkan juga berkenaan dengan distribusi kekuasaan dan implementasinya bagi kesetaraan akses publik kelompok-kelompok yang majemuk tersebut.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural juga adalah multikulturalisme, yang tiada lain merupakan ideologi dengan pengakuan dan pengagungan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun kebudayaan. Multikulturalisme menganggap bahwa etnosentrisme, xenosentrisme maupun xenofobia bukan tutur kata dan sikap yang relevan. Yang relevan ialah kewajiban untuk menghormati hak-hak atas keanekaan budaya atau hak-hak untuk berbeda secara budaya. Multikulturalisme dengan demikian memproklamasikan emansipasi budaya-budaya kecil yang masing-masing juga memiliki "hak hidup" yang wajib dihormati (Bahar, 2000; Naisbitt, J., 1994; Nash, J., 1975; Suparlan, 2014).

Keanekaan budaya yang masing-masing duduk sama rendah berdiri sama tinggi ini merupakan konsientisasi berikut yang disodorkan oleh multikulturalisme. Pada tingkat praktis, multikulturalisme juga menunjuk kemungkinan "penyesuaian budaya" atau "dialog budaya" dalam pengalaman individual maupun kelompok. Sebagai sebuah ideologi, multikulturalisme memiliki dimensi politik dan kebudayaan. Di dalamnya, penghargaan atas keberagaman budaya menjadi mainstream sosial. Dalam pengertiannya secara politis, multikulturalisme merupakan kebijakan terhadap perlindungan keberagaman latar belakang identitas kolektif (etnis, agama, ataupun ras) di dalam suatu negara bangsa (Setyaningrum, 2003; I. W. G. Suacana, 2005).

Indonesia, sebagai sebuah negara bangsa yang multi-etnis dan multikultural, sudah sejak awal mengandung masalah legitimasi kultural. Hal ini terjadi karena negara Indonesia lahir secara tiba-tiba melalui revolusi politik nasional. Akibatnya, kehadiran negara di Indonesia merupakan sebuah hasil kolektif hampir seluruh daerah dan kelompok etnis yang ada. Keadaan ini secara keseluruhan telah menciptakan status yang sama di antara daerah-daerah yang terlibat di dalam revolusi sehingga hubungan daerah-daerah tersebut pada dasarnya berbentuk kolegial daripada superior-subordinat (Bahar, 2000; Schefold, 1998). Oleh karena itu, tantangan bangsa ini adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran baru kepada identitas baru yang bernama "identitas nasional" dengan implikasi psikologis yang menyenangkan. Ketika proses pembentukan identitas, solidaritas sosial dan nasionalisme Indonesia terganggu, maka ketika itu pula semangat identitas dan loyalitas kebangsaan yang berbasiskan etnis muncul dan menuntut untuk bertransformasi menjadi suatu entitas politik pula (baca: negara baru).

Oleh karenanya, ada tiga hal penting yang harus mendapatkan perhatian serius, dengan adanya diferensiasi masyarakat kita yang multikultural tersebut, yaitu: Pertama, terus menerus menumbuhkan "solidaritas emosional" dalam bingkai kebangsaan. Dengan kata lain, setiap komponen bangsa dituntut untuk memiliki kemampuan "seni mencintai" yang baik, sehingga interaksi antar-etnis dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. Untuk itu diperlukan pemahaman budaya tiap-tiap kelompok etnis sehingga masing-masing kelompok memiliki sensitivitas dalam berinteraksi dengan kelompok lain. Pengelolaan negara juga harus diarahkan sedemikian rupa sehingga berbagai kebijakan yang dijalankan tidak menimbulkan perasaan termarginalisasi bagi suatu kelompok etnis (Jack C. Plano et al., 1989; Nash, J., 1975). Kedua, mendorong gerakan integrasi nasional (National Integration Movement) yang mulai berkembang belakangan di kalangan masyarakat sipil (Civil Society) untuk memberikan kesempatan berkumpul dan berinteraksi bagi orang-orang Indonesia dari berbagai latar belakang agama, suku, etnis, gender dan pendidikan yang punya kepedulian tinggi terhadap masalah persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, pembangunan bangsa harus terus dilanjutkan dengan melakukan pengelolaan kehidupan bernegara sedemikian rupa sehingga menumbuhkan "solidaritas fungsional" yaitu solidaritas yang didasarkan pada ikatan saling ketergantungan satu sama lain dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Sistem pemerintahan yang sentralistis sedapat mungkin dihindarkan, karena akan merusak tumbuhnya solidaritas fungsional ini (Kohn, 1984; Krishna, 2005; Kusumohamidjojo, 2000).

Dalam konteks struktur sosial masyarakat, diferensiasi sosial menjadi komponen penting yang mempengaruhi hubungan antarindividu dan kelompok. Menurut Peter M. Blau, diferensiasi sosial dapat diuraikan menjadi dua parameter utama: parameter nominal dan parameter kelas. Parameter nominal mencakup pembagian kelompok masyarakat berdasarkan ciri-ciri yang bersifat diskrit seperti suku, agama, dan ras, sementara parameter kelas berkaitan dengan hierarki sosial yang lebih bersifat kontinu seperti pendapatan, kekuasaan, dan status. Dua bentuk diferensiasi sosial yang timbul dari kedua parameter tersebut adalah heterogenitas dan kesenjangan sosial. Heterogenitas mengacu pada keragaman sosial berdasarkan parameter nominal, sedangkan kesenjangan sosial merujuk pada perbedaan status berdasarkan parameter kelas. Kedua bentuk ini memiliki dampak yang signifikan terhadap proses integrasi masyarakat dan perkembangan sistem demokrasi. Semakin tinggi tingkat heterogenitas atau kesenjangan sosial, semakin besar hambatan terhadap integrasi sosial dan kohesi sosial.

Lebih lanjut, hubungan antara berbagai parameter struktur sosial dapat mengambil bentuk interseksi atau konsolidasi. Interseksi terjadi ketika diferensiasi sosial berdasarkan satu parameter tidak berkorelasi dengan parameter lainnya, yang dapat menciptakan struktur sosial yang lebih fleksibel dan sekuler. Sebaliknya, konsolidasi terjadi ketika perbedaan pada satu parameter diperkuat oleh perbedaan pada parameter lain, yang berpotensi menciptakan struktur sosial yang lebih kaku dan multikultural. Dalam masyarakat multikultural, seperti yang diuraikan dalam tesis Gabriel A. Almond, terdapat risiko berkembangnya konflik antar-komunitas, terutama ketika perbedaan-perbedaan tersebut saling memperkuat satu sama lain.

Proses modernisasi di negara-negara berkembang, menurut Horowitz, sering kali memperparah konflik etnis akibat ketidakseimbangan distribusi ekonomi dan kesempatan pendidikan. Modernisasi yang tidak merata ini memicu ketidakpuasan di kalangan kelompok-kelompok etnis yang merasa terpinggirkan, yang pada akhirnya memperburuk konflik sosial. Di sisi lain, multikulturalisme sebagai sebuah ideologi bertujuan untuk menyeimbangkan berbagai ekspresi kebudayaan dalam masyarakat yang plural. Namun,

terdapat diskrepansi antara multikulturalisme sebagai kebijakan politik dan sebagai realitas sosial. Dalam konteks Indonesia, tantangan terbesar adalah bagaimana mentransformasikan kesadaran multikulturalisme menjadi identitas nasional yang inklusif. Hal ini mencakup upaya untuk menumbuhkan solidaritas emosional dan fungsional di antara berbagai kelompok etnis, serta mendorong gerakan integrasi nasional yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa diferensiasi sosial, baik dalam bentuk heterogenitas maupun kesenjangan sosial, memiliki dampak yang kompleks terhadap integrasi sosial. Upaya untuk mengelola keragaman ini harus dilakukan dengan bijaksana, melalui penerapan multikulturalisme yang sejati dan kebijakan yang mampu menumbuhkan solidaritas antar kelompok. Integrasi nasional yang kuat dapat tercapai jika setiap kelompok dalam masyarakat merasa dihargai dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan.

#### 4. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun simpulan yang di dapatkan dimana fenomena glokalisasi yang menggabungkan unsur global dan lokal telah membawa perubahan dalam dinamika nasionalisme, yang tetap relevan di tengah kompetisi global. Nasionalisme tidak hanya mengacu pada kebanggaan terhadap bangsa, tetapi juga melibatkan sentimen etnis (etno-nasionalisme) yang dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Konflik etnis yang berbasis primordialisme, sering kali disebabkan oleh ketidakadilan distribusi kekuasaan, ekonomi, dan kesempatan pendidikan, menunjukkan tantangan dalam menjaga integrasi sosial. Dalam konteks masyarakat multikultural seperti Indonesia, nasionalisme harus berkembang sejalan dengan penghargaan terhadap keragaman budaya, yang menciptakan identitas nasional yang inklusif dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, nasionalisme bukan hanya hasil akhir, melainkan proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis dan tantangan modernisasi. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah untuk menjaga keutuhan bangsa dan mengelola etno-nasionalisme secara konstruktif, diperlukan pendekatan yang mengutamakan pengelolaan keragaman budaya dan keadilan sosial. Pemerintah harus mendorong kebijakan yang tidak hanya menghormati perbedaan, tetapi juga memberikan akses yang setara bagi semua kelompok etnis dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan politik. Selain itu, penting untuk memperkuat solidaritas emosional dan fungsional di antara masyarakat melalui program-program yang mempromosikan interaksi positif antar kelompok etnis. Dengan demikian, semangat nasionalisme dapat dipertahankan tanpa mengorbankan hak-hak dan martabat kelompok minoritas, sehingga menciptakan negara bangsa yang stabil dan harmonis di tengah tantangan globalisasi.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Alomnd, G. A. (1977). *Comparative Political Systems*, dalam dalam Macridis and Brown, *Comparative Politics: Notes and Reading*. The Dorsey Press.
- Amal, Ichlasul, & Armawi, A. (2000). *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Amal, Ichlasul, & Arnawi, A. (2000). *Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Ansyar, R. (2003). *Kelahiran Rasa Nasionalisme*. Harian Kompas.
- Arifin, M. (2004). *Kontinuitas dan Perubahan Nasionalisme di Indonesia dalam Perspektif Global dan Lokal*. Universitas Mulawarman.
- Bahar, S. (2000). *Regionalisme, nasionalisme, dan ketahanan nasional*. Gadjah Mada University Press.
- Benedict, A. (1991). *Komunitas Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Pustaka Pelajar Kerjasama Dengan Insist. <https://insistpress.com/katalog/komunitas-komunitas-imajiner-renungan-tentang-asal-usul-dan-penyebaran-nasionalisme/>
- Bennet, D. (1993). *Cultural Studies: Pluralism and Theory*. Melbourne University Literary and Cultural Studies.
- Blau, P. M. (1975). *Approach to Study of Social Structure*. The Free Press.
- Budiardjo, M. (1986). *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Penerbit Sinar Harapan.

- Cassel, C., & Symon, G. (1994). *Qualitative Methodes in Organization Research. A Pratical Guide*. Sage Publications.
- Gaffar, A. (1988). *Teori Empirik Demokrasi dan Alternatif Pemikiran Tentang Pelaksanaan Demokrasi Pancasila*. Seminar Pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
- Hobsbwan, E. J. (1992). *Nasionalisme Menjelang Abad XXI*. Tiara Wacana.
- Huntington, Samuel. P. (2000). *Benturan Antar Peradaban dan Politik Masa Depan Dunia*. Penerbit Qalam.
- Jack C. Plano, Robert E Riggs, & Helenan S.robin. (1989). *Kamus analisa politik*. Rajawali Pers.
- Kartodirdjo, S. (1972). *Kolonialisme dan Nasionalisme di Indonesia Pada Abad 19 dan Abad 20*. Seksi Penelitian Djurusan Sedjarah, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada.
- Kartodirdjo, S. (2000). *Kesukuan dan Masyarakat Adab (Ethnicity and Civil Society) dalam Regionalisme, Nasionalisme, dan Ketahanan Nasional*. . Gadjah Mada University Press.
- Kohn, H. (1984). *Nasionalisme Arti dan Sejarahnya*. Erlangga.
- Krishna, A. (2005). *Sebuah Refleksi Sejarah: Indonesia Jaya*. PT One Earth Media.
- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinekaan Mayarakat di Indonesia*. PT Grasindo.
- Mardiansyah. (n.d.). *Negara bangsa dan konflik etnis: Nasionalisme vs etno-nasionalisme*. Fisipol UGM.
- Mas'oed. (1998). *Nasionalisme dan tantangan global masa kini*. Gadjah Mada University Press.
- Mohanty, B., & Dash, S. (2018). *Comparative Politics*. [www.vikaspublishing.com](http://www.vikaspublishing.com)
- Naisbitt,J. (1994). *Global Paradox*. Bina Aksara.
- Nash. J. (1975). *Nasionalisme and fieldwork*. *Annual Review of Anthropology*, 4.
- Nasikun. (1988). *Konteks sosio-kultural pelaksanaan demokrasi di Indonesia*. Seminar Pelaksanaan Demokrasi Pancasila.
- Parimartha, I. G. (2002). *Bali dalam globalisasi abad XVI-XX: Suatu perspektif sejarah*. *Jurnal Sosial Politik Sarathi*, 9(2), 25–40.
- Russel, B. (1988). *Kekuasaan: Sebuah Analisis Sosial Baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Russell, B. (1988). *Kekuasaan: Sebuah analisis sosial baru*. Yayasan Obor Indonesia.
- Schefold, R. (1998). *The Domestication of Culture: Nation-building and Ethnic Diversity in Indonesia*. *JSTOR*, 259–280.
- Setyaningrum, A. (2003). *Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial*. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politil*.
- Suacana, I. W. (2024). *Kapita Seleкта Pemerintahan (3rd ed.)*. CV.Eureka Media Aksara.
- Suacana, I. W. G. (2005, May 11). *Landasan multikulturalisme cegah konflik pilkada*. *Bali Post*.
- Suparlan, P. (2014). *Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural*. *Semantic Scholar*.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press.
- Triguna, Y. (2002). *Hindu dan modernitas: Pidato penguکuhan guru besar dalam ilmu sosiologi agama*. Fakultas Ilmu Agama Universitas Hindu Indonesia.